

## Siaran Pers

# **MEMBEDAH ANGKA KEMISKINAN TERKINI: LANGKAH STRATEGIS UNTUK TERUS TURUNKAN KEMISKINAN**

**Jakarta** – Untuk membangun pemahaman yang baik tentang perkembangan, pengukuran, dan penyebab pengurangan kemiskinan, kaitannya dengan ketimpangan dan konsumsi masyarakat, serta strategi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan diskusi media bertajuk “Membedah Angka Kemiskinan Terkini” di Ruang Rapat Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gedung Bappenas, Kamis (19/7). Dalam diskusi tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa angka kemiskinan nasional Maret 2018 sebesar 9,82 persen atau mencakup 25,9 juta penduduk Indonesia yang baru saja dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), adalah angka kemiskinan terendah sejak masa Orde Baru. “Angka kemiskinan yang berhasil menembus satu digit tersebut berarti jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 turun sebesar 1,82 juta jiwa atau 0,82 persen poin dibandingkan Maret 2017. Penurunan ini diharapkan terus terjadi hingga mencapai target Rencana Kerja Pemerintah atau RKP sebesar 8,5–9,5 persen pada 2019,” ujar Menteri Bambang.

Jika dibandingkan dengan pengukuran kemiskinan Bank Dunia yang dipakai untuk perbandingan antar negara, Garis Kemiskinan Nasional (GKN) pada Maret 2018 semakin mendekati Garis Kemiskinan Internasional. Untuk membandingkan angka kemiskinan antarkelompok negara, Bank Dunia menggunakan estimasi konsumsi yang dikonversi ke dalam US\$ *Purchasing Power Parity* (PPP) atau paritas daya beli, bukan nilai tukar US\$. Untuk negara *lower middle income*, Bank Dunia menetapkan dua set batasan kemiskinan internasional yaitu 1,90 US\$ PPP sebagai batas *extreme poverty* dan 3,20 US\$ PPP sebagai batas *poverty*. Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dengan jumlah yang sama, dibandingkan dengan barang dan jasa yang dapat dibeli dengan harga US\$ 1. Mengacu pada perhitungan tersebut, posisi GKN Indonesia pada Maret 2017 senilai 374.478 rupiah/kapita/bulan atau setara 2,34 \$ PPP/hari, sementara posisi GKN Indonesia pada Maret 2018 adalah 401.220 rupiah/kapita/bulan setara 2,50 \$ PPP/hari. Dengan demikian, GKN Indonesia 2018 setara dengan Garis Kemiskinan Internasional, dihitung dengan konversi 1 US\$ senilai 5.341,50 rupiah, dengan *baseline* 2011 PPP untuk tahun 2018.

Terkait Inflasi, perkembangan dalam setahun terakhir yang secara langsung mempengaruhi kenaikan angka kemiskinan adalah daya beli masyarakat (*purchasing power*). Pada periode 2017-2018, inflasi umum tercatat relatif rendah. Namun, pada umumnya, inflasi yang dirasakan masyarakat miskin (*poverty basket inflation*) tercatat lebih tinggi. Pada periode September 2017-Maret 2018, inflasi umum senilai 1,92 persen turut berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Gejolak harga pangan di beberapa daerah di waktu tertentu juga sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Contohnya, kasus hama wereng cokelat yang melanda setidaknya 30 kabupaten penghasil beras di Jawa Tengah pada 2017. Di akhir 2017 hingga awal 2018, inflasi padi, umbi dan hasilnya terlihat naik cukup tajam karena adanya kelangkaan beras. Hal ini dikarenakan kurangnya pasokan gabah kering sehingga banyak penggilingan yang tidak beroperasi serta mahal biaya operasi. Pada Maret 2018 inflasi dapat diturunkan kembali dan angkanya tercatat lebih rendah dari 2017.

Komoditas beras masih merupakan proporsi terbesar dalam pembentukan GKN, baik di perdesaan maupun perkotaan. Menjaga inflasi pada komoditas makanan, terutama beras, menjadi kunci utama dalam menurunkan angka kemiskinan. Harga beras cenderung stabil tahun 2016 hingga bulan September 2017. Lonjakan harga beras yang terjadi di akhir 2017 hingga awal 2018 karena beberapa faktor dapat dikendalikan dan berangsur turun mulai Februari 2018 hingga mencapai harga 11.907 rupiah/kilogram per Juni 2018. Hal ini juga turut mendukung penurunan kemiskinan Maret 2018. “Saya mengingatkan tingginya pengeluaran rokok pada rumah tangga miskin, dampaknya terhadap ekonomi keluarga, dan akibatnya pada kesehatan. Badan Pusat Statistik telah mencatat rokok kretek filter sebagai komoditi terbesar kedua penyumbang garis kemiskinan di Indonesia. Pada kelompok 40 persen penduduk dengan status sosial ekonomi terendah, jumlah perokok terbesar ditemukan bekerja pada sektor konstruksi dan kelompok pendidikan rendah,” tutur Menteri Bambang.

Selama periode Maret 2017–Maret 2018, penurunan kemiskinan terjadi di semua provinsi kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Papua. Namun pada periode September 2017–Maret 2018, peningkatan kemiskinan terjadi di Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Meski jumlah penduduk yang sudah keluar dari kemiskinan tercatat cukup besar, namun kelompok tersebut masih rentan terhadap berbagai *shock*, seperti saat terjadi guncangan harga pangan, sakit, atau hilang pekerjaan. Kelompok ini dapat dengan mudah jatuh miskin, baik dalam jangka panjang maupun tahunan. Statistiknya, 1 dari 5 orang yang berhasil keluar dari kemiskinan dapat kembali miskin. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Panel 2014-2015, sebanyak 54 persen Rumah Tangga pada 2014 jatuh miskin di 2015. Jika dibandingkan keseluruhan penduduk antara kota dan desa, pertumbuhan kelompok menengah ke atas di desa cukup tinggi, namun belum diiringi pertumbuhan yang tinggi pada kelompok miskin. Sementara, pertumbuhan kelompok menengah di kota relatif stagnan.

“Secara agregat, pertumbuhan konsumsi riil masyarakat cukup stabil, di kisaran lima persen, artinya konsumsi masyarakat tetap tumbuh dari tahun ke tahun. Perlu diperhatikan juga, bahwa konsumsi riil per kapita pada kuartal pertama 2018 lebih tinggi dari kuartal pertama beberapa tahun sebelumnya, yaitu mencapai 5,2 juta rupiah per kapita. Ini menunjukkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga dengan baik. Meningkatnya konsumsi masyarakat tercermin juga dari peningkatan impor barang konsumsi yang merupakan indikasi sinyal positif terhadap naiknya daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Impor barang konsumsi per kapita juga terlihat meningkat, yang saat ini mencapai kisaran angka US\$ 15 per kapita per kuartal,” tutur Menteri Bambang.

Impor barang konsumsi yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia terutama adalah barang konsumsi setengah tahan lama, seperti mainan anak, barang plastik, dan sepatu, serta barang konsumsi tak tahan lama semisal parfum dan obat-obatan. Sementara itu, barang konsumsi tahan lama yang banyak diimpor adalah mesin pendingin. Saat ini, perubahan tren gaya hidup masyarakat Indonesia dicerminkan melalui perubahan pola konsumsi, yaitu porsi belanja jasa yang meningkat serta kecenderungan belanja melalui layanan daring (*online*). Dalam kurun waktu 10 tahun, proporsi belanja transportasi dan komunikasi serta belanja restoran dan hotel mengalami peningkatan, seiring dengan tren kebutuhan rekreasi dan komunikasi yang meningkat. “Sepanjang tahun 2017, sekurangnya 28 juta penduduk Indonesia membeli barang konsumsi melalui *e-Commerce*, yang kenaikannya mencapai 13 persen dari tahun sebelumnya,” papar Menteri Bambang. Pengguna internet ke depan akan terus meningkat sehingga akan terus mendorong masyarakat untuk belanja melalui *e-commerce*. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017 menunjukkan bahwa sebagian besar akses internet di Indonesia digunakan untuk media sosial, memperoleh berita atau informasi, serta membeli barang dan jasa.

Untuk terus menekan angka kemiskinan, pemerintah menyiapkan lima strategi. *Pertama*, meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Di tataran makro, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan mengembangkan infrastruktur wilayah tertinggal. Di tataran mikro, untuk masyarakat sangat miskin dan miskin, pemerintah berupaya memberikan bantuan pangan (*rastra*) & Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat. Untuk masyarakat miskin dan rentan, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dengan akses permodalan, meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran, mengembangkan keterampilan layanan usaha, serta mengembangkan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan.

*Kedua*, memantapkan kelompok menengah ke bawah, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa untuk memperkuat infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang sekaligus memperkuat pengembangan produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor terus dilaksanakan. Selain itu, penguatan perekonomian *inspired middle income class* diwujudkan melalui kemudahan ijin usaha bagi pemula, penguatan usaha mikro dan kecil serta pemberdayaan koperasi, serta peningkatan keahlian tenaga kerja dan sertifikasi keahlian. Perluasan manfaat Dana Desa untuk kelompok ekonomi menengah terbawah juga diterapkan melalui pembangunan infrastruktur dasar dengan program *cash for works*, perbaikan pelayanan dasar, serta penguatan perekonomian lokal.

*Ketiga*, reformasi anggaran subsidi. Alokasi untuk subsidi bahan bakar turun signifikan pada 2015. Alokasi subsidi dialihkan ke Dana Desa dan Transfer Daerah untuk mengurangi ketimpangan. Reformasi subsidi terus dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran, kesinambungan fiskal, dan diversifikasi energi. *Keempat*, peningkatan anggaran perlindungan sosial. Pada periode 2010-2018, penurunan subsidi yang signifikan, dari 3,4 persen menjadi 0,8 persen PDB pada periode 2015 dan 2018 dialokasikan untuk perlindungan sosial melalui premi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin serta perluasan program bantuan sosial. Pada 2018, anggaran yang cukup besar akan dialokasikan untuk infrastruktur dan investasi ekonomi. *Kelima*, penguatan ekonomi domestik dan tata kelola impor. Penguatan ekonomi domestik diwujudkan melalui realisasi peningkatan kemudahan berusaha di daerah yang dipantau dengan ketat, mengingat implementasinya sering tidak sesuai dengan kebijakan pusat. “Selain itu, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat dengan menjaga inflasi terutama dari tekanan sisi suplai melalui pengurangan hambatan arus distribusi antarwilayah dan antarpulau, mengefektifkan TPID, serta mendorong penyediaan produksi pangan dan bahan pokok lain. Investor domestik dan wirausaha lokal juga didorong untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Pemerintah mengurangi tekanan impor melalui penerapan kewajiban penyedia lapak *online* menjual barang lokal dengan komposisi minimal tertentu serta kemudahan investasi sektor industri untuk menyediakan bahan baku yang selama ini diimpor,” tutup Menteri Bambang.

Jakarta, 19 Juli 2018

Thohir Afandi  
Plt. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan  
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:  
Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan  
Kementerian PPN/Bappenas  
Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310  
Telepon: (021) 31936207, Faks.: (021) 31901154  
*e-mail*: [humas@bappenas.go.id](mailto:humas@bappenas.go.id)